

Transformasi Wahhabisme di Era Visi 2030: Adaptasi Agama dalam Dinamika Politik Arab Saudi

1st Farah Farouk Alwyni, 2nd Mohammad Izdiyan Muttaqin

Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia

1st farahhfarouk@gmail.com

Abstract

The transformation of Wahhabism in Saudi Arabia within the framework of Vision 2030 reflects a fundamental shift in the relationship between religion, state, and society. Although Wahhabism has historically served as the ideological foundation of the Saudi kingdom since the 18th century, the modernization policies promoted by Crown Prince Mohammed bin Salman have systematically pushed for a reformulation of this doctrine. This study adopts a qualitative approach using literature review methods to analyze the state's strategies in reconstructing Wahhabism and their socio-political implications. The primary focus includes the redefinition of religious discourse, co-optation of the clerical establishment, and the deconstruction of Wahhabi symbols in public spaces. Moreover, the study highlights the impact of these changes on the legitimacy of political power, the role of clerics, and the relationship between religion and the state. Utilizing institutional and discourse analysis frameworks, this research finds that the state is not only reshaping internal ideological structures but is also repositioning religion as a tool for development and social control. The findings indicate a shift from religion-based legitimacy to performance-based legitimacy, alongside the marginalization of independent clerics and the institutionalization of a more pragmatic, state-defined version of Islam.

Keywords: *Wahhabism, Vision 2030, Saudi Arabia, religion and state, clerics, socio-political transformation*

Abstrak

Transformasi Wahhabisme di Arab Saudi dalam kerangka Visi 2030 mencerminkan pergeseran mendasar dalam hubungan antara agama, negara, dan masyarakat. Meskipun Wahhabisme historis menjadi fondasi ideologis kerajaan sejak abad ke-18, kebijakan modernisasi yang diusung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mendorong reformulasi ajaran ini secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis strategi negara dalam merekonstruksi Wahhabisme serta implikasi sosial-politiknya. Fokus utama penelitian ini meliputi redefinisi wacana keagamaan, kooptasi institusi ulama, dan dekonstruksi simbol-simbol Wahhabi dalam ruang publik. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampaknya terhadap legitimasi kekuasaan, posisi ulama, dan relasi agama-negara. Dengan pendekatan analisis institusional dan wacana keagamaan, studi ini menemukan bahwa negara

tidak hanya membentuk ulang struktur ideologis internal, tetapi juga mereposisi agama sebagai instrumen pembangunan dan kontrol sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya transisi dari legitimasi berbasis agama menuju legitimasi berbasis kinerja, disertai marjinalisasi ulama independen dan institusionalisasi Islam versi negara yang lebih pragmatis.

Kata kunci: *Wahhabisme, Visi 2030, Arab Saudi, Agama dan Negara, Ulama, Transformasi Sosial-Politik.*

A. Pendahuluan

Wahhabisme merupakan salah satu arus fundamentalisme Islam yang berkembang di Jazirah Arab sejak abad ke-18 dan memiliki peran sentral dalam pembentukan fondasi ideologis negara Arab Saudi sejak pendiriannya pada tahun 1932 (Commins, 2006). Ajaran ini berakar pada pemikiran Muhammad ibn Abdul Wahhab, seorang ulama mazhab Hanbali dari wilayah Najd, yang menyerukan pemurnian ajaran Islam melalui penegasan tauhid dan penolakan terhadap praktik keagamaan yang dianggap sebagai syirik dan bid'ah (Haykel, 2009). Dalam lintasan sejarahnya, Wahhabisme memperoleh dimensi politik yang kuat ketika Muhammad ibn Abdul Wahhab menjalin aliansi strategis dengan Muhammad bin Saud pada tahun 1744. Aliansi ini menjadi tonggak awal terbentuknya hubungan simbiotik antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik yang terus berlanjut dan mengkristal dalam struktur negara Saudi *modern* (Lacroix, 2011).

Dalam sistem politik Arab Saudi, Wahhabisme tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas keagamaan, melainkan terinstitusionalisasi secara formal dalam berbagai lembaga negara. Kementerian Pendidikan, peradilan syariah, serta lembaga polisi agama (Hai'ah al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar) menjadi instrumen utama dalam mendiseminasikan nilai-nilai Wahhabi ke dalam kehidupan sosial masyarakat (Al-Rasheed, 2010). Melalui mekanisme ini, Wahhabisme berperan sebagai pedoman normatif dalam perumusan kebijakan publik sekaligus membentuk identitas nasional Arab Saudi sebagai penjaga kemurnian Islam. Model relasi ini relatif stabil selama beberapa dekade, khususnya pada masa pemerintahan Raja Faisal dan Raja Fahd, ketika legitimasi keagamaan dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika konflik regional (Gause III, 2016). Namun demikian, dalam satu dekade terakhir, fondasi relasi tersebut mulai mengalami pergeseran seiring munculnya kepemimpinan baru dan agenda reformasi struktural yang terangkum dalam Visi 2030 (Kinninmont, 2017).

Visi 2030 yang diluncurkan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman pada tahun 2016 merupakan program transformasi nasional yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak (Government of Saudi Arabia, 2016). Program ini tidak hanya berfokus pada reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup perubahan sosial dan budaya yang signifikan jika dibandingkan dengan norma konservatif yang sebelumnya dominan. Kebijakan seperti pembukaan bioskop dan industri hiburan, penyelenggaraan konser musik, peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik, serta pembatasan kewenangan polisi syariah menandai babak baru kehidupan sosial Saudi yang lebih terbuka dan terkontrol oleh negara (Alhussein, 2019).

Transformasi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai masa depan Wahhabisme dalam kerangka negara Saudi kontemporer. Apakah Wahhabisme sedang mengalami marginalisasi, direformulasi, atau justru direorientasikan ulang agar selaras dengan kepentingan politik dan ekonomi negara? Pertanyaan ini menjadi krusial mengingat Wahhabisme bukan sekadar sistem kepercayaan keagamaan, melainkan juga elemen struktural dalam arsitektur kekuasaan negara Saudi (Haykel, 2015). Oleh karena itu, perubahan kebijakan negara di era Visi 2030 secara implisit menuntut penyesuaian terhadap posisi dan fungsi Wahhabisme dalam ruang publik dan pemerintahan.

Kajian akademik mengenai relasi antara Wahhabisme dan negara Saudi telah banyak dilakukan oleh para sarjana seperti Madawi Al-Rasheed, Stéphane Lacroix, dan Bernard Haykel. Al-Rasheed (2020) menyoroti bagaimana Wahhabisme dimanfaatkan negara sebagai instrumen kontrol ideologis untuk menjaga stabilitas monarki absolut. Lacroix (2011) mengkaji dinamika antara ulama negara dan gerakan Sahwa (kebangkitan Islam), yang menunjukkan bahwa Wahhabisme tidak bersifat monolitik dan kerap mengalami fragmentasi internal. Sementara itu, Haykel (2009) menekankan bahwa Salafisme termasuk Wahhabisme merupakan proyek ideologis yang bersifat adaptif terhadap perubahan konteks politik.

Meskipun demikian, sebagian besar literatur masih menitikberatkan pada peran ulama dan konflik internal dalam tubuh Wahhabisme. Relatif sedikit penelitian yang secara eksplisit menganalisis bagaimana negara Saudi secara aktif membentuk ulang narasi Wahhabisme di bawah agenda Visi 2030 (Al-Saud, 2021). Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian untuk mengkaji Wahhabisme sebagai konstruksi diskursif yang direayasa dan disesuaikan

oleh negara demi kepentingan stabilitas politik, legitimasi kekuasaan, dan pembangunan nasional (Derendinger & Frank, 2023).

Penelitian ini memposisikan Wahhabisme bukan semata-mata sebagai doktrin keagamaan, melainkan sebagai konstruksi ideologis yang dinegosiasikan dan direproduksi oleh negara. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana negara Saudi, khususnya di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman, melakukan penataan ulang peran, otoritas, dan narasi Wahhabisme dalam rangka menopang agenda reformasi Visi 2030. Dengan demikian, artikel ini tidak bertujuan menilai benar atau salahnya Wahhabisme secara teologis, melainkan menganalisis transformasinya sebagai instrumen politik dan legitimasi kekuasaan dalam konteks negara otoriter yang sedang melakukan modernisasi terkontrol. Fokus utama kajian ini adalah perubahan peran dan pengaruh Wahhabisme sejak dimulainya agenda reformasi besar-besaran Visi 2030 di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Wahhabisme mengalami transformasi bentuk dan fungsi dalam konteks politik dan pembangunan Arab Saudi di era Visi 2030. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan strategi negara dalam mereformulasi narasi dan praktik Wahhabisme; (2) mengkaji implikasi transformasi tersebut terhadap posisi ulama dan institusi keagamaan; serta (3) memahami bagaimana perubahan relasi agama dan negara berkontribusi pada upaya negara mempertahankan stabilitas dan legitimasi kekuasaan.

Kontribusi akademik artikel ini terletak pada upayanya mengisi kekosongan literatur mengenai peran aktif negara dalam membentuk ulang Wahhabisme sebagai ideologi resmi. Dengan menempatkan Wahhabisme dalam kerangka analisis politik dan diskursif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang agama dan kekuasaan di negara-negara Muslim kontemporer, khususnya dalam konteks reformasi otoriter dan modernisasi negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis transformasi Wahhabisme dalam kerangka kebijakan Visi 2030 Arab Saudi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan memahami perubahan makna, fungsi, dan posisi Wahhabisme sebagai ideologi keagamaan dalam struktur negara (Aprila et al., 2023; Rahmadhani et al., 2023). Analisis difokuskan pada Wahhabisme sebagai konstruksi ideologis

yang mengalami penyesuaian seiring perubahan orientasi politik dan pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman.

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal internasional, laporan kebijakan, dokumen resmi pemerintah Arab Saudi, serta publikasi media kredibel yang relevan dengan tema hubungan agama dan negara. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis tematik dan interpretatif, dengan mengidentifikasi pola-pola perubahan wacana keagamaan, kebijakan negara terhadap institusi ulama, serta praktik pengelolaan agama di era Visi 2030. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kritis untuk menjelaskan bagaimana negara Saudi merekonstruksi Wahhabisme guna mendukung stabilitas politik, legitimasi kekuasaan, dan agenda modernisasi nasional (Suminar et al., 2025).

C. Pembahasan dan Temuan

C.1. Wahhabisme sebagai Pilar Negara dan Identitas Ideologis Saudi

Sejak berdirinya negara Saudi modern pada tahun 1932, Wahhabisme berfungsi sebagai fondasi ideologis yang melekat erat pada struktur kekuasaan monarki. Ajaran ini tidak hanya berperan sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi politik bagi keluarga Saud. Dalam konfigurasi ini, Wahhabisme menjembatani otoritas spiritual dengan keabsahan politik, khususnya di wilayah Najd sebagai basis historis dakwah Muhammad ibn Abdul Wahhab (Haykel, 2009). Relasi ini memungkinkan negara mengklaim legitimasi religius atas kekuasaan absolutnya, sekaligus membingkai loyalitas politik sebagai bagian dari kepatuhan keagamaan.

Institusionalisasi Wahhabisme diwujudkan melalui berbagai lembaga negara, seperti Kementerian Urusan Islam, Mahkamah Syariah, serta Komite Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Negara menjadikan doktrin Wahhabi sebagai standar moral nasional, sementara ulama diberikan ruang institusional dan sumber daya untuk menyebarkan ajaran tersebut melalui khutbah, kurikulum pendidikan, dan media resmi. Al-Rasheed (2010) menyebut relasi ini sebagai simbiosis fungsional, di mana ulama menyediakan legitimasi teologis bagi monarki, sementara negara menjamin dominasi dan keberlanjutan tafsir Wahhabi sebagai ideologi resmi.

Konfigurasi ini memungkinkan negara mengonsolidasikan kekuasaan melalui moralitas Islam. Kritik terhadap kerajaan tidak hanya dipersepsikan sebagai oposisi politik, tetapi juga sebagai penyimpangan dari Islam yang benar. Dengan demikian, Wahhabisme beroperasi sebagai instrumen kontrol sosial dan politik yang efektif (Rahman et al., 2021). Hegemoni ini

diperkuat melalui kontrol ketat atas pendidikan dan media, yang secara sistematis memproduksi narasi keseragaman Islam versi negara.

Sebagaimana dicatat Commins (2006), kurikulum pendidikan Saudi secara sadar dirancang untuk meneguhkan Wahhabisme sebagai representasi Islam yang murni, sementara mazhab dan tradisi Islam lain diposisikan sebagai deviasi. Strategi ini tidak hanya meminggirkan diskursus alternatif, tetapi juga menormalisasi dominasi ideologis negara. Dalam ranah hukum, Mahkamah Syariah Saudi mengadopsi pendekatan Hanbali-Wahhabi sebagai dasar yurisprudensi, dengan rujukan kuat pada ulama kontemporer seperti Ibn Baz dan Ibn Utsaimin (Vogel, 2000). Praktik ini menunjukkan bahwa Wahhabisme memiliki fleksibilitas politik yang memungkinkan penyesuaian interpretasi hukum sesuai dengan kepentingan rezim.

C.2. Transformasi Ideologis dalam Era Visi 2030

Untuk memperjelas perubahan struktural yang terjadi, transformasi posisi Wahhabisme sebelum dan sesudah peluncuran Visi 2030 dapat disajikan secara ringkas dalam Tabel 1. Penyajian ini bertujuan menegaskan bahwa perubahan yang terjadi bukan bersifat gradual-alamiah, melainkan merupakan rekayasa ideologis yang diarahkan oleh negara.

Tabel 1. Pergeseran Posisi Wahhabisme dalam Struktur Negara Saudi

Dimensi Analisis	Pra-Visi 2030	Era Visi 2030
Status Wahhabisme	Ideologi negara dominan	Agama resmi yang dikelola negara
Relasi Ulama–Negara	Simbiosis ideologis	Subordinasi institusional
Produksi wacana keagamaan	Didominasi ulama konservatif	Dikontrol dan dikurasi negara
Fungsi agama	Legitimasi religius kekuasaan	Stabilitas politik & pembangunan
Moral publik	Penegakan berbasis doktrin	Regulasi berbasis kebijakan negara

Peluncuran Visi 2030 oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman menandai perubahan fundamental dalam orientasi pembangunan Arab Saudi. Program ini bertujuan mentransformasi ekonomi berbasis minyak menjadi ekonomi terdiversifikasi, dengan menekankan investasi, sektor non-minyak, dan partisipasi swasta (Government of Saudi Arabia, 2016). Namun, transformasi ini tidak bersifat ekonomistik semata. Ia juga membawa implikasi ideologis dan

keagamaan yang signifikan, khususnya terhadap posisi Wahhabisme dalam arsitektur negara (Alhussein, 2019).

Salah satu perubahan paling menonjol adalah pergeseran narasi keagamaan dari Islam konservatif menuju Islam moderat. Moderasi agama dipromosikan sebagai prasyarat bagi integrasi ekonomi global, peningkatan pariwisata, dan perbaikan citra internasional Saudi (Ulrichsen, 2021). Pernyataan MBS pada 2017 tentang kembalinya Saudi pada Islam moderat menjadi simbol reposisi ideologis negara, sekaligus menandai berkurangnya dominasi ulama konservatif dalam ruang publik.

Pembatasan kewenangan polisi moral sejak 2016, revisi kurikulum pendidikan agama, serta penghapusan konten intoleran menunjukkan bahwa negara mulai mengambil alih kontrol atas produksi wacana keagamaan (Meijer, 2020). Transformasi ini juga mencerminkan pergeseran relasi kekuasaan: dari ketergantungan negara pada legitimasi ulama menuju dominasi negara atas interpretasi agama. Ulama yang menentang arah reformasi mengalami marginalisasi atau represi, sebagaimana terlihat dalam kasus penahanan tokoh-tokoh Sahwa (Human Rights Watch, 2018).

Lacroix (2019) menyebut proses ini sebagai upaya pembentukan “Islam negara” yang depolitisasi dan berorientasi pada pembangunan nasional. Melalui proyek-proyek seperti NEOM dan pembentukan lembaga moderasi beragama, negara mengintegrasikan reformasi keagamaan ke dalam strategi pembangunan. Fenomena ini selaras dengan konsep soft desecularization, di mana negara tidak menyingkirkan agama, melainkan mengatur dan mengarahkannya sesuai kepentingan politik (Assyaukanie, 2021).

C.3. Strategi Negara dalam Rekonstruksi Wahhabisme

Transformasi Wahhabisme di era Visi 2030 merupakan hasil rekayasa negara yang sistematis. Untuk menegaskan sifat terencana dari proses ini, strategi negara dalam merekonstruksi Wahhabisme dapat dipetakan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2. Tabel ini merangkum dimensi kebijakan, instrumen yang digunakan, serta tujuan politik yang ingin dicapai.

Tabel 2. Strategi Negara dalam Rekonstruksi Wahhabisme

Strategi	Instrumen Utama	Tujuan Politik
-----------------	------------------------	-----------------------

Redefinisi wacana keagamaan	Kurikulum, media resmi, pidato elite	Depolitisasi Islam & loyalitas nasional
Kooptasi institusi ulama	Dewan Ulama, regulasi fatwa	Kontrol legitimasi keagamaan
Dekonstruksi simbol Wahhabi	Kebijakan budaya & pariwisata	Nation branding & modernisasi

Transformasi Wahhabisme di era Visi 2030 merupakan hasil rekayasa negara yang sistematis. Strategi ini mencakup redefinisi wacana keagamaan, kooptasi institusi ulama, dan dekonstruksi simbol Wahhabi dalam ruang publik.

Pertama, negara menggeser wacana keagamaan menuju narasi Islam nasional yang menekankan loyalitas kepada negara dan stabilitas politik. Konsep ketaatan kepada wali al-amr diperkuat, sementara narasi jihad dan aktivisme keagamaan direduksi (Al-Rasheed, 2020). Produksi wacana ini dikelola melalui lembaga resmi dan media negara, dengan istilah “Wahhabisme” secara gradual dihindari demi kepentingan branding global (Gause III, 2018).

Kedua, negara melakukan kooptasi terhadap institusi ulama dengan menundukkan otoritas keagamaan di bawah kendali birokrasi. Ulama kritis dimarginalkan, sementara ulama loyal dipromosikan sebagai agen legitimasi kebijakan negara. Relasi ini menandai pergeseran dari simbiosis ideologis menuju subordinasi institusional (Lacroix, 2019).

Ketiga, negara mendekonstruksi simbol-simbol Wahhabi melalui liberalisasi terbatas ruang sosial dan budaya. Pembukaan bioskop, konser musik, serta perluasan peran perempuan menunjukkan bahwa negara kini menjadi produsen utama norma sosial. Transformasi simbolik ini berfungsi sebagai instrumen nation branding dan penyesuaian nilai keagamaan dengan agenda pembangunan ekonomi (Ulrichsen, 2021).

C.4. Implikasi Sosial dan Politik Transformasi Wahhabisme

Transformasi Wahhabisme berdampak langsung pada legitimasi kekuasaan, posisi ulama, dan relasi agama-negara. Legitimasi monarki bergeser dari basis religius menuju legitimasi berbasis kinerja (*performance legitimacy*), dengan pembangunan ekonomi, modernisasi sosial, dan stabilitas sebagai sumber utama otoritas politik (Al-Rasheed, 2020). Dalam konteks ini, agama tidak lagi menjadi satu-satunya penyangga simbolik kekuasaan, melainkan salah satu instrumen yang dikombinasikan dengan capaian pembangunan dan narasi kemajuan.

Namun, pergeseran ini mengandung risiko struktural. Ketika legitimasi dibangun terutama di atas performa ekonomi dan sosial, kegagalan negara dalam memenuhi ekspektasi masyarakat khususnya generasi muda dapat berimplikasi serius terhadap stabilitas politik. Agama yang sebelumnya berfungsi sebagai sumber legitimasi jangka panjang tidak lagi sepenuhnya mampu menutup potensi krisis kepercayaan terhadap negara (Ulrichsen, 2021).

Perubahan tersebut juga berdampak pada posisi ulama. Ulama yang sebelumnya berperan sebagai mitra ideologis negara kini direduksi menjadi aparatus legitimasi kebijakan. Ulama kritis mengalami marginalisasi, kriminalisasi, atau pembungkaman, sementara ulama loyal dipromosikan sebagai representasi Islam resmi negara (Human Rights Watch, 2018). Kondisi ini menciptakan kebingungan normatif di tingkat masyarakat, terutama bagi kelompok yang tumbuh dalam kerangka nilai Wahhabi konservatif yang relatif stabil selama beberapa dekade (Rahmadhani et al., 2025; Salsabila et al., 2024).

Secara lebih luas, relasi agama dan negara mengalami reartikulasi mendalam. Arab Saudi bergerak dari model negara yang didefinisikan oleh agama menuju negara yang secara aktif mengelola agama. Dalam model ini, Islam direformulasi sebagai simbol nasionalisme religius yang dikontrol negara, sementara ruang interpretasi keagamaan independen dipersempit. Transformasi ini menegaskan bahwa Wahhabisme tidak dihapus dari struktur negara, melainkan direkonstruksi agar kompatibel dengan proyek modernisasi otoriter yang dijalankan melalui Visi 2030.

C.5. Diskusi Teoretis: Wahhabisme sebagai Agama yang Dikelola Negara (*State-Managed Religion*)

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi Wahhabisme di Arab Saudi dapat dipahami secara teoretis melalui kerangka *state-managed religion*. Dalam kerangka ini, agama tidak disingkirkan dari ruang publik sebagaimana dalam sekularisme klasik, tetapi justru diintegrasikan dan diatur secara ketat oleh negara untuk menopang stabilitas politik dan agenda pembangunan. Negara berperan sebagai aktor utama dalam menentukan batas-batas ortodoksi, otoritas keagamaan, serta ekspresi religius yang dianggap sah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *soft desecularization* yang menjelaskan bahwa negara modern, khususnya yang bersifat otoriter, cenderung tidak memisahkan agama dari politik, melainkan menginstrumentalisasikannya secara selektif (Assyaukanie, 2021). Dalam konteks Saudi, Wahhabisme direformulasi dari ideologi keagamaan yang relatif otonom

menjadi perangkat administratif dan diskursif negara. Negara tidak lagi bergantung pada ulama sebagai sumber legitimasi utama, melainkan menjadikan ulama sebagai perpanjangan tangan kebijakan publik.

Lebih jauh, proses ini mencerminkan pola *authoritarian resilience*, di mana rezim mempertahankan kekuasaannya dengan menyesuaikan institusi ideologis terhadap tuntutan globalisasi dan ekonomi pasar (Gerschewski, 2013). Reformasi Wahhabisme memungkinkan negara Saudi mengurangi tekanan internasional terkait ekstremisme agama, sekaligus menjaga kontrol domestik melalui regulasi ketat atas wacana keislaman. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai sumber legitimasi yang fleksibel, dapat diperluas atau dipersempit sesuai kebutuhan politik.

Diskusi ini menegaskan bahwa transformasi Wahhabisme bukanlah proses liberalisasi keagamaan yang murni, melainkan strategi politik negara untuk merekonstruksi identitas religius nasional. Wahhabisme tetap hadir sebagai fondasi simbolik negara, tetapi dalam bentuk yang telah didepolitisasi, dinasionalisasi, dan disesuaikan dengan logika pembangunan. Temuan ini memperkaya kajian tentang hubungan agama dan negara di dunia Muslim dengan menunjukkan bagaimana ideologi keagamaan dapat direkayasa ulang sebagai instrumen modernisasi otoriter.

D. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika Wahhabisme di Arab Saudi pada era Visi 2030 tidak dapat dipahami sebagai kemunduran peran agama, melainkan sebagai proses rekayasa ideologis yang disengaja dan terpusat oleh negara. Wahhabisme yang selama beberapa dekade berfungsi sebagai fondasi legitimasi normatif kekuasaan monarki kini mengalami pergeseran fungsi menjadi agama resmi yang dikelola secara administratif dan politis. Negara Saudi secara aktif membatasi otonomi ulama, mengendalikan institusi keagamaan, serta menyaring wacana Islam yang beredar di ruang publik agar sejalan dengan kepentingan stabilitas politik dan agenda pembangunan nasional. Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan historis antara Wahhabisme dan negara tidak bersifat statis atau sakral, melainkan pragmatis dan tunduk pada kalkulasi kekuasaan. Dengan demikian, transformasi Wahhabisme dalam konteks Visi 2030 merefleksikan pergeseran dari simbiosis ideologis menuju subordinasi keagamaan, di mana agama tetap dipertahankan sebagai sumber legitimasi, tetapi kehilangan kapasitas kritis dan politisnya.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menegaskan bahwa Visi 2030 harus dibaca sebagai proyek politik yang bersifat multidimensional, yang mencakup restrukturisasi ekonomi sekaligus rekonfigurasi hubungan antara agama dan negara. Dalam kerangka ini, negara Saudi tidak berupaya menghapus identitas Islamnya, tetapi justru membangun bentuk Islam resmi yang lebih kompatibel dengan nasionalisme, globalisasi, dan tuntutan pasar internasional. Wahhabisme diredefinisi agar tidak lagi menjadi basis oposisi atau sumber resistensi moral, melainkan instrumen ideologis yang mendukung hegemoni negara. Kasus Arab Saudi ini memberikan kontribusi penting bagi kajian politik Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa dalam negara otoriter modern, modernisasi tidak selalu beriringan dengan sekularisasi, melainkan dapat berjalan melalui instrumentalisasi agama yang semakin teknokratis dan terkontrol. Oleh karena itu, studi ini menegaskan bahwa agama dalam konteks negara Islam kontemporer bukanlah entitas yang melemah, tetapi justru semakin terintegrasi dalam mekanisme kekuasaan negara.

Daftar Pustaka

- Al-Rasheed, M. (2010). *A History of Saudi Arabia* (2nd ed.). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511993510>
- Al-Rasheed, M. (2020). *The Son King: Reform and Repression in Saudi Arabia*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/the-son-king-9780190070617>
- Al-Saud, A. (2021). Reframing Wahhabism: Religious Discourse and State Power in Saudi Arabia. *Journal of Arabian Studies*, 11(2), 173–189.
<https://doi.org/10.1080/21534764.2021.1962047>
- Alhussein, E. (2019). *Social Change in Saudi Arabia under Vision 2030*.
<https://agsiw.org/social-change-in-saudi-arabia-under-vision-2030/>
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. (2023). Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BUMNAG) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225. <https://doi.org/10.30813/jab.v16i2.4461>
- Assyaukanie, L. (2021). Religion, State Control, and Soft Desecularization in the Muslim World. *Journal of Indonesian Islam*, 15(2), 273–296.
<https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.273-296>
- Commins, D. (2006). *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. I.B. Tauris.

- <https://www.bloomsbury.com/uk/wahhabi-mission-and-saudi-arabia-9781845118098>
- Derendinger, J., & Frank, R. (2023). Religion as Statecraft: Saudi Arabia's Reconfiguration of Islamic Authority under Vision 2030. *Politics and Religion*, 16(3), 512–534. <https://doi.org/10.1017/S1755048322000479>
- Gause III, F. G. (2016). *Saudi Arabia in the New Middle East*. Council on Foreign Relations Press. <https://www.cfr.org/book/saudi-arabia-new-middle-east>
- Gause III, F. G. (2018). Ideologies, Alliances, and Underbalancing in the Middle East. *Security Studies*, 27(1), 1–31. <https://doi.org/10.1080/09636412.2017.1416813>
- Gerschewski, J. (2013). The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes. *Democratization*, 20(1), 13–38. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.738860>
- Government of Saudi Arabia. (2016). *Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia*. <https://www.vision2030.gov.sa>
- Haykel, B. (2009). *Revival and Reform in Islam: The Legacy of Muhammad ibn Abd al-Wahhab*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/revival-and-reform-in-islam>
- Haykel, B. (2015). Saudi Arabia and Political Islam: The Wahhabi Challenge. In N. J. Brown & A. Hamzawy (Eds.), *Between Religion and Politics* (pp. 45–62). Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/2015/02/18/saudi-arabia-and-political-islam-pub-59071>
- Human Rights Watch. (2018). *Saudi Arabia: Arrests of Clerics and Activists*. <https://www.hrw.org/news/2018/09/18/saudi-arabia-arrests-clerics-activists>
- Kinninmont, J. (2017). *Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract: Austerity and Transformation*. <https://www.chathamhouse.org/2017/07/vision-2030-and-saudi-arabias-social-contract>
- Lacroix, S. (2011). *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674057584>
- Lacroix, S. (2019). *Saudi Arabia and the Limits of Religious Reform* (Issue 36). <https://pomeps.org/saudi-arabia-and-the-limits-of-religious-reform>
- Meijer, R. (2020). Education Reform and Religious Narratives in Saudi Arabia. *Die Welt Des Islams*, 60(2), 287–309. <https://doi.org/10.1163/15700607-06002005>
- Rahmadhani, P., Apriwan, A., & Setyaka, V. (2023). *Perubahan Kebijakan Luar Negeri*
231 *Farah Farouk Alwyni, Mohammad Izdiyan Muttaqin*

- Amerika Serikat dalam Mengatasi Imigran Ilegal di Perbatasan dengan Meksiko. *Palito*, 2(2), 39–53. <https://doi.org/10.25077/palito.2.2.39-53.2023>
- Rahmadhani, P., Perwita, A. A. B., & Ramsi, O. (2025). Building Regional Readiness Indonesia's Leadership in Enhancing AHA Centre's Disaster Response Capabilities. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 3(3), 907–928. <https://doi.org/10.58578/ijhess.v3i3.6951>
- Rahman, R. A., Zahari, M. S. M., Hanafiah, M. H., & Mamat, M. N. (2021). Effect of Halal Food Knowledge and Trust on Muslim Consumer Purchase Behavior of Syubhah Semi-Processed Food Products. *Journal of Food Products Marketing*, 27(6), 319–330. <https://doi.org/10.1080/10454446.2021.1994079>
- Salsabila, W., Apriwan, A., & Dermawan, R. (2024). Upaya Indonesia Menanggulangi IUU Fishing di Laut Arafura-Timor Melalui “Arafura And Timor Seas Ecosystem Action.” *Palito*, 3(02), 263–280. <https://doi.org/10.25077/palito.v3i02.225>
- Suminar, S. H., Perwita, A. A. B., & Ramsi, O. (2025). Hedging through Defence Diplomacy: Indonesia's Non-Alignment in the Age of Emerging Technologies. *Asian Journal of Science, Technology, Engineering, and Art*, 3(4), 1340–1355. <https://doi.org/10.58578/ajstea.v3i4.7112>
- Ulrichsen, K. C. (2021). Economic Reform and Political Legitimacy in Saudi Arabia. *Middle East Policy*, 28(4), 32–45. <https://doi.org/10.1111/mepo.12589>
- Vogel, F. E. (2000). *Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia*. Brill. <https://brill.com/display/title/8758>